



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULFACHMI WAHAB
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 920890

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.511.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 354.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 557.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	545.000.000
1. MOBIL, BMW X1 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
2. MOTOR, VESPA GTS 150 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. MOTOR, HARLEY DAVIDSON STREET GLIDE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	400.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.330.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.786.000.000
III. HUTANG	Rp.	220.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.566.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : RETNO SUDEWI
- Jabatan** : WAKIL DIREKTUR PENUNJANG
- NHK** : 215124

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/80 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/80 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 837 m2/750 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , Rp. 1.250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	305.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOBIL, WRV RS CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	73.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	588.407.545
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.616.907.545
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.616.907.545

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.